

IMPLEMENTASI KURIKULUM TERPADU SISTEM *FULL DAY SCHOOL* (Studi Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Ibnu Atha'illah Kandangan)

Bahran

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong,
Indonesia

Email: bahranhruslan@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to explore information about the model and implementation of the integrated curriculum of the full day school system. This type of research is a descriptive field research using a qualitative approach, taking the background at MI Ibnu Atha'illah Kandangan. The results of the study indicate that the implementation of an integrated curriculum at MI Ibnu Atha'illah: a) planning includes the preparation of a curriculum structure based on the vision and mission of the madrasa, the division of learning time that adopts the boarding school system, and the manufacture of learning tools by teachers taken from various literatures. b) The implementation of learning in the teacher's class uses a variety of methods, but the learning facilities and media are still incomplete, and the priority of teacher qualifications is religious knowledge and the Koran. c) Evaluation of curriculum content is carried out by each teacher in the class, and evaluation of learning outcomes uses written, oral (memorization) and practical test techniques.

Keywords: *Implementation, Integrated Curriculum, Full Day School.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai model dan implementasi kurikulum terpadu sistem *full day school*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat diskriptif menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengambil latar pada MI Ibnu Atha'illah Kandangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kurikulum terpadu di MI Ibnu Atha'illah: a) perencanaan meliputi penyusunan struktur kurikulum yang berlandaskan pada visi dan misi madrasah, pembagian waktu belajar yang mengadopsi sistem pondok pesantren, dan pembuatan perangkat pembelajaran oleh guru yang diambil dari berbagai literatur. b) Pelaksanaan pembelajaran dikelas guru menggunakan metode yang bervariasi namun sarana dan media pembelajarannya masih kurang lengkap, dan kualifikasi guru yang diutamakan adalah ilmu agama dan

Alquran. c) Evaluasi muatan kurikulum dilaksanakan oleh masing-masing guru dikelas, dan evaluasi hasil belajar menggunakan teknik tes tertulis, lisan (hafalan) dan praktik.

Kata Kunci: Implementation, Kurikulum Terpadu, *Full Day School*.

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia senantiasa menjadi kajian menarik yang tiada habis-habisnya. Hal itu disebabkan karena mayoritas warga negara Indonesia memeluk agama Islam. Sebagai elemen negara-bangsa, pendidikan Islam tidak bisa dinafikan begitu saja eksistensinya. Selain kontribusinya yang begitu besar terhadap keberlangsungan negara-bangsa, tantangan yang dihadapinya juga luar biasa besar, baik dalam lingkungan internal, lebih-lebih jika dihadapkan pada lingkungan eksternal. Perhatian terhadap sinyalemen kemunduran serta harapan atas keunggulan dan mutu pendidikan Islam bukan tanpa alasan.

Sebagaimana diketahui, dalam beberapa risalah, Indonesia ditasbihkan sebagai negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia meskipun Indonesia bukanlah negara Islam. Mengabaikan keberadaan pendidikan Islam sama artinya dengan memandang sebelah mata pembangunan manusia Indonesia secara keseluruhan. Sebab, pembangunan pendidikan manusia Indonesia secara keseluruhan dan pendidikan Islam, ibarat dua sisi mata uang yang sama. Keduanya memiliki nilai yang setara. Oleh karena itu, curahan perhatian terhadap upaya untuk memajukan pendidikan Islam harus terus menerus ditumbuhkembangkan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa upaya untuk menumbuhkembangkan pendidikan Islam melalui berbagai pemikiran dan implikasinya sudah banyak dilakukan. Hal itu disemangati oleh kenyataan bahwa pendidikan Islam dewasa ini mendapatkan tantangannya yang relevan. Tantangan dimaksud antara lain kehadiran era negara-bangsa tanpa batas (*borderless*) yang lebih populer dilabeli sebagai pergaulan global antarbangsa atau globalisasi dalam segala bidang. Termasuk di dalamnya ialah kehadiran abad informasi dengan pembaruan teknologinya yang menjangkau setiap keluarga Islam, bahkan ke setiap individu. Para cerdik-cendekia dan pemikir peradaban Islam di Indonesia

sudah berupaya keras untuk senantiasa menyosialisasikan dan memperbarui telaah pemikiran pendidikan Islam dengan berbagai metode dan strategi agar pendidikan Islam berada pada aras keunggulan untuk kepentingan umat manusia.

Namun demikian, sebagaimana dirasakan banyak pihak, pendidikan Islam masih dihadapkan pada persoalan dikotomis dalam sistem pendidikannya. Di Indonesia telah terjadi dikotomi yang cukup mendasar dan meluas. Dikotomi tersebut terjadi dalam bentuk pemisahan kelembagaan pendidikan umum (nasional) dan lembaga keagamaan (Islam). Begitu juga telah terjadi pemisahan antara mata pelajaran umum dan mata pelajaran agama.

Upaya untuk menyelesaikan persoalan dikotomi pernah dilakukan oleh negara-negara muslim. Menurut Fazlur Rahman ada dua segi orientasi yang pernah dilakukan. *Pertama*, dengan menerima pendidikan sekuler modern sebagaimana telah berkembang secara umum di Barat dan mencoba untuk “mengislamkannya” dengan cara mengisinya konsep-konsep tertentu dari Islam. *Kedua*, para ahli yang berpendidikan modern untuk menenami bidang kajian masing-masing dengan nilai Islam pada perangkat-perangkat yang lebih tinggi menggunakan perspektif Islam, untuk mengubah baik kandungan maupun orientasi kajian-kajian mereka. atau menurut Syaifuddin Sabda ialah dengan cara menggabungkan atau memadukan cabang-cabang pengetahuan modern dengan cabang-cabang pengetahuan keislaman tradisional yang diberikan secara bersama-sama di suatu lembaga pendidikan Islam. Pola pendidikan terpadu sebagaimana digambarkan oleh Fazlur Rahman di atas tampaknya hampir mirip dengan apa yang telah dilaksanakan pada pendidikan Islam di Indonesia.

Persoalan dikotomi dalam pendidikan Islam, hingga kini masih belum terselesaikan dengan baik, khususnya upaya untuk menciptakan pembelajaran yang dapat mengarah pada upaya pemaduan ilmu pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Berdasarkan kondisi yang dialami lembaga pendidikan Islam serta gagasan pengembangannya, maka salah satu upaya yang sangat perlu dilakukan adalah rekonstruksi ulang konsep kurikulum mata pelajaran umum yang diterapkan di lembaga pendidikan Islam selama ini.

Pesantren atau pondok adalah lembaga yang bisa dikatakan wujud proses dalam perkembangan sistem pendidikan nasional. Dari segi historis pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman, tapi juga mengandung makna keaslian kultur di Indonesia (*indigenous*).

Pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan bercorak asli Indonesia sudah sejak awal berdirinya memiliki kurikulum tersendiri dalam menyelenggarakan pendidikan. Keunikan pesantren adalah keotonomiannya dalam menentukan kurikulum pendidikan seperti apa yang paling cocok dan sesuai untuk mewujudkan visi misi yang mereka idealkan dalam hal ini tentu visi misi sang pemilik pesantren (Kyai).

Pada masa pasca kemerdekaan banyak pesantren yang menyesuaikan diri dengan tuntutan keadaan. Misalnya, menyelenggarakan pendidikan formal, seperti madrasah, disamping tetap meneruskan pola lama dengan sistem wetonan dan sorogan.

Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam, pesantren sejak dulu mengalami banyak tantangan, terutama sejak gagasan modernisme Islam di Indonesia menemukan momentumnya pada awal abad ke-20. Tantangan pesantren yang pertama adalah diadopsinya sistem dan lembaga pendidikan modern secara hampir menyeluruh. Tantangan kedua adalah adanya eksperimentasi sistem pendidikan pesantren yang dimodernisasi dengan mengadopsi aspek-aspek tertentu dari sistem pendidikan modern, khususnya dalam aspek kurikulum, teknik dan metode pengajaran.

Dalam perkembangannya pesantren yang telah mengadopsi sistem madrasah tidak hanya mengajarkan ilmu umum untuk sekedar pengetahuan. Ketika pemerintah menawarkan kurikulum nasional diajarkan di madrasah-madrasah milik pesantren supaya lulusannya bisa disamakan dengan lembaga-lembaga pendidikan milik pemerintah, pihak pesantren dengan senang hati menerimanya. Namun penerimaan ini tidak lantas serta merta menghilangkan ciri kepesantrenan yang ada, naluri inovatif pesantren selalu hadir untuk menyiasati agar semuanya dapat berjalan bersama. Seperti diketahui, antara kurikulum pemerintah dengan pesantren perbedaannya sangat jauh, kalau boleh disederhanakan yang pertama hanya berorientasi keduniaan saja

sementara yang kedua sebaliknya yakni lebih berorientasi pada masalah keakhiratan.

Keadaan tersebut menimbulkan adanya kecenderungan baru di kalangan praktisi pesantren untuk mengembangkan madrasah menjadi madrasah unggulan dengan sistem kurikulum yang terpadu (*integrated curriculum*), yang memadukan kurikulum sekolah umum dan keagamaan secara utuh dan bersifat *adaptif, inklusif dan saintifik* (berdasar ilmu pengetahuan) dalam lembaga pendidikan Islam. Dengan penerapan kurikulum tersebut diharapkan para santri sebagai outputnya tidak saja menguasai ilmu agama Islam (akhirat), namun juga menguasai IPTEK (keduniaan), sehingga mampu menjadi motor penggerak bagi kemajuan peradaban Islam yang berada di bawah pendidikan pesantren.

Meski diberlakukan otonomi daerah yang berdampak langsung pada otonomi pendidikan, dalam praktiknya, pemerintah menetapkan prosentase pengajaran materi umum lebih banyak dari pada materi keagamaan. Jika madrasah milik pesantren menerima mentah-mentah model pembagian seperti ini maka madrasah milik pesantren tidak ada bedanya lagi dengan madrasah negeri yang dimiliki pemerintah dan ini adalah ironis. Oleh karenanya Madrasah milik pesantren harus bisa menyikapinya, salah satunya dengan pengembangan model kurikulum terpadu yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan madrasah.

Sekolah Islam dalam konteks ini adalah sekolah atau lembaga pendidikan umum yang bernapaskan Islam. Pada umumnya, model lembaga pendidikan ini diselenggarakan oleh yayasan maupun organisasi Islam, seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan lain-lain. Jika dilihat dari perspektif sejarah, sekolah Islam merupakan perkembangan lebih lanjut dari sistem sekolah Belanda. Sistem tersebut mulai diadopsi pertama kali oleh Muhammadiyah sejak organisasi ini berdiri, dengan mengambil alih sistem sekolah Belanda dan memasukkan agama Islam sebagai mata pelajaran wajib.

Sekolah terpadu dalam praktiknya melakukan pengembangan kurikulum dengan cara memadukan kurikulum Pendidikan Nasional (Kemendiknas), kurikulum pendidikan agama Islam yang ada di Kementrian Agama (Kemenag), dan ditambah dengan

kurikulum hasil kajian Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) dengan sistem *full day school*.

Secara sekilas pengertian *full day school* adalah sekolah yang menerapkan sistem sekolah mulai pagi sampai sore yang biasanya hanya sampai siang, untuk sekolah *full day* ini waktu yang digunakan dalam pembelajaran lebih lama, karena ada tambahan pelajaran yang dianggap perlu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Titik tekan pada *full day school* adalah siswa selalu berprestasi belajar dalam proses pembelajaran yang berkualitas yakni diharapkan akan terjadi perubahan positif dari setiap individu siswa sebagai hasil dari proses dan aktivitas dalam belajar.

Salah satu Madrasah milik pesantren yang menerapkan kurikulum terpadu adalah Madrasah Ibtidaiyah Ibnu Atha'illah yang terletak di Desa Kapuh Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam pelaksanaan pembelajarannya, Madrasah Ibtidaiyah Ibnu Atha'illah melakukan pengembangan kurikulum dengan memadukan kurikulum Kementerian Agama (Mengacu pada Permenag RI No. 000912 Th 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum MI) dengan kurikulum pondok pesantren.

Di Madrasah Ibtidaiyah Ibnu Atha'illah, bentuk pengembangan waktu belajarnya menggunakan sistem *full day school* (mulai pagi sampai sore) dari hari sabtu sampai kamis (hari Jumat libur). Dari segi prestasi dan output memang belum ada yang dihasilkan oleh MI Ibnu Atha'illah. Namun antusiasme dan minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sana sangat tinggi. Faktor kurikulum dan waktu belajarnya yang menjadi alasan mereka. Meski baru memasuki beberapa tahun, jumlah siswa baru yang masuk meningkat dari tahun pertamanya. Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti lebih dalam lagi tentang bagaimana Implementasi Kurikulum Terpadu Sistem *Full Day School* dan Implementasinya di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ibnu Atha'illah Kapuh Kandangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkap

keadaan yang bersifat alamiah secara holistik. Masalah dan fakta digambarkan secara diskriptif berdasarkan data-data lapangan yang diperoleh. Penelitian diskriptif pada umumnya tidak menggunakan hipotesis. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan bukan berupa angka tetapi berupa kata-kata atau gambaran fenomena yang sedang terjadi di lapangan. Data yang dimaksud berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, tape recorder, catatan atau memo atau dokumen resmi lainnya.

Penetapan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini sesuai dengan pendapat Donald Ary yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif memiliki 6 ciri yaitu: (1) mempedulikan konteks atau situasi (*concern for context*), (2) berlatar alamiah (*natural setting*), (3) instrumen utama adalah manusia (*human instrument*), (4) data bersifat deskriptif (*descriptive data*), (5) rancangan penelitian muncul bersamaan dengan pengamatan (*emergent design*), dan (6) analisis data secara induktif (*inductive analysis*).

Pendekatan kualitatif pada penelitian ini dapat dipandang sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diambil dengan tujuan untuk menjelaskan konsep dan model serta implementasi kurikulum terpadu sistem *full day school* di MI Ibnu Atha'illah.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Kurikulum Terpadu

Kurikulum terpadu atau *integrated curriculum* sebagai salah satu bentuk dari pengembangan kurikulum secara istilah mengandung arti perpaduan, koordinasi, harmoni, kebulatan keseluruhan. *Integrated curriculum* meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Dengan kebulatan bahan pelajaran diharapkan anak-anak mempunyai pribadi *integrated* yakni manusia yang sesuai atau selaras hidupnya dengan sekitarnya.

Integrated curriculum dilaksanakan melalui pengajaran unit. Menurut pendapat Caswell yang dikutip oleh S. Nasution menjelaskan bahwa suatu unit mempunyai tujuan yang bermakna bagi anak yang biasanya dituangkan dalam bentuk masalah. Untuk mencegah masalah tersebut anak-anak melakukan

serangkaian kegiatan yang saling berkaitan menghadapkan anak kepada masalah berarti merangsangnya untuk berfikir dan ia merasa tidak puas sebelum memecahkan masalah tersebut.

Sekolah-sekolah yang progresif cenderung meninggalkan kurikulum yang *subject centered*, karena dianggap tidak menghasilkan pribadi yang harmonis. Karena itu pelajaran disusun sebagai keseluruhan yang disebut *broad unit*. Unit ini mengandung suatu soal atau masalah yang dipelajari anak selama beberapa bulan.

Kurikulum terpadu (*terintegrasi*) adalah kurikulum perpaduan antara beberapa jenis kurikulum yang dilaksanakan dalam satu jenjang jenis pendidikan. Perpaduan beberapa jenis kurikulum tersebut di antaranya kurikulum Kemendiknas, kurikulum Kemenag, kurikulum yayasan dan kurikulum murid.

2. Pembelajaran *Full Day School*

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan peserta didik. Karena dengan melaksanakan pendidikan maka seseorang akan mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan yang akan berguna baginya dimasa yang akan datang. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan pada hakekatnya tidak sekedar mengarah pada hasil pendidikan akan tetapi juga pada proses pelaksanaan pendidikan, proses disini termasuk model kurikulum yang diterapkan. Berkenaan dengan penerapan kurikulum terpadu, sistem *full day school* merupakan salah satu bentuk model pendidikan yang sangat mendukung untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Menurut etimologi, kata *full day school* berasal dari bahasa Inggris. Terdiri dari kata *full* mengandung arti penuh, dan *day* artinya hari. Maka *full day* mengandung arti sehari penuh. *Full day* juga berarti hari sibuk. Sedangkan *school* artinya sekolah. Jadi arti dari *full day school* jika dilihat dari segi etimologinya berarti sekolah atau kegiatan belajar yang dilakukan sehari penuh atau sekolah sepanjang hari.

Menurut Yustanto sistem *full day school* artinya sekolah yang menerapkan waktu belajar sejak pagi hingga sore hari. Berbasis pada kurikulum Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Departemen Agama (Depag) dengan penambahan muatan lokal 3-4 jam lebih lama dari waktu sekolah biasa.

Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan di sekolah mulai pagi hingga sore hari, secara rutin sesuai dengan program pada tiap jenjang pendidikannya. Program ini banyak ditemukan pada sekolah tingkat dasar SD/MI swasta yang berstatus unggulan. Dalam *full day school* lembaga bebas mengatur jadwal mata pelajaran sendiri dengan tetap mengacu pada standar nasional. Alokasi waktu sebagai standar minimal dan sesuai bobot mata pelajaran, ditambah dengan model-model pendalamannya.

Full day school adalah sekolah yang dirancang sedemikian rupa layaknya sekolah formal, juga didesain mampu memberikan harapan pasti terhadap masyarakat. Misalnya, nilai plus yang belum diberikan saat pelajaran formal berlangsung, antara lain latihan belajar kelompok, latihan berjamaah shalat wajib dan sunah dhuha, latihan membaca doa bersama dan lain sebagainya.

Hal yang mampu memikat para siswa adalah sekolah *full day school* ini sarat dengan permainan, yang bertujuan agar proses belajar mengajar penuh dengan kegembiraan, permainan-permainan yang menarik bagi siswa untuk belajar, betah di sekolah, dan mendapatkan nilai plus yang berbasis keislaman. Dengan demikian, sekolah dapat menciptakan keakraban antara guru dengan siswa, juga para orang tua. Situasi dan kondisi yang sangat menyenangkan ini akan melahirkan generasi yang cerdas intelektual, cerdas emosional dan cerdas spiritual.

Banyak alasan mengapa *full day school* menjadi pilihan. Pertama, meningkatnya jumlah orang tua tunggal dan banyaknya aktifitas orangtua (*parent-career*) yang kurang memberikan perhatian pada anaknya, terutama yang berhubungan dengan aktifitas anak setelah pulang dari sekolah. Kedua, perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat dari masyarakat agraris menuju ke masyarakat industri. Perubahan tersebut jelas berpengaruh pada pola pikir dan cara pandang masyarakat. Ketiga, perubahan sosial budaya mempengaruhi pola pikir dan cara pandang masyarakat. Salah satu ciri masyarakat industri adalah mengukur keberhasilan dengan materi. Keempat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu cepat sehingga jika tidak dicermati, maka kita akan menjadi korban, terutama korban teknologi komunikasi.

3. Implementasi Kurikulum Terpadu

Kurikulum dapat dilihat dari empat bentuk/tingkatan, yakni kurikulum sebagai konsepsi atau ide, sebagai rencana tertulis, sebagai kegiatan (proses), dan sebagai hasil belajar. Mengutip pendapat Hasan, Syaifuddin Sabda mengemukakan pada hakekatnya dilihat dari sudut pengembangan kurikulum, kurikulum sebagai proses sebenarnya adalah implementasi kurikulum sebagai rencana.

Implementasi disamping dipandang sebagai sebuah proses, implementasi juga dipandang sebagai penerapan sebuah inovasi atau perbaikan, implementasi dapat berlangsung terus menerus sepanjang waktu, implementasi harus dapat menyelesaikan perbedaan antara praktek yang diharapkan dengan kenyataan.

Dalam implementasi kurikulum, ada tiga tahapan atau langkah yang harus dilakukan, yaitu:

a. Perencanaan Kurikulum

Dimaksud dengan perencanaan di sini adalah perencanaan dalam konteks implementasi kurikulum secara umum. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan kurikulum adalah siapa yang bertanggung jawab dalam perencanaan kurikulum, dan bagaimana perencanaan kurikulum itu direncanakan secara professional.

Hal yang pertama dikemukakan berkenaan dengan kenyataan adanya gap atau jurang antara ide-ide strategi dan pendekatan yang dikandung oleh suatu kurikulum dengan usaha-usaha implementasinya. Gap ini disebabkan oleh masalah keterlibatan personal dalam perencanaan kurikulum. Keterlibatan personal ini banyak bergantung pada pendekatan perencanaan kurikulum yang dianut.

Pada pendekatan yang bersifat "*administrative approach*" kurikulum direncanakan oleh pihak atasan kemudian diturunkan kepada instansi-instansi bawahan sampai kepada guru-guru. Jadi *form the top down*, dari atas ke bawah atas inisiatif administrator. Dalam kondisi ini guru-guru tidak dilibatkan. Mereka lebih bersifat pasif yaitu sebagai penerima dan pelaksana di lapangan. Semua ide, gagasan dan inisiatif berasal dari pihak atasan.

Sebaliknya pada pendekatan yang bersifat "*grass roots approach*" yaitu yang dimulai dari bawah, yakni dari pihak guru-guru atau sekolah-sekolah secara individual dengan harapan bisa

meluas ke sekolah-sekolah lain. Kepala sekolah serta guru-guru dapat merencanakan kurikulum atau perubahan kurikulum karena melihat kekurangan dalam kurikulum yang berlaku. Mereka tertarik oleh ide-ide baru mengenai kurikulum dan bersedia menerapkannya di sekolah mereka untuk meningkatkan mutu pelajaran dan dengan bertindak dari pandangan bahwa guru adalah manager (*the teacher as manager*) J.G Owen sangat menekankan perlunya keterlibatan guru dalam perencanaan kurikulum. Guru harus ikut bertanggung jawab dalam perencanaan kurikulum Karena dalam praktek mereka adalah pelaksana-pelaksana kurikulum yang sudah disusun bersama

b. Pelaksanaan Kurikulum

Dari rangkaian proses manajemen, tahap ini merupakan fungsi yang paling utama. Pelaksanaan sebagai usaha menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan berbagai teknik atau alat bantu yang digunakan, waktu pencapaian, pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dengan berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap yang terlibat dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya.

Rancangan kurikulum dan implementasi kurikulum adalah sebuah sistem yang membentuk sebuah garis lurus dalam arti implementasi mencerminkan rancangan, maka sangat penting sekali pemahaman guru sebagai pengajar merupakan inti kurikulum untuk memahami perancangan kurikulum dengan baik dan benar serta didukung oleh ahli pendidikan dan pelaku pendidikan lain.

Proses implementasi kurikulum membutuhkan rancangan dengan kesiapan yang matang terutama pada sektor pelaksana Pada tingkatan kelas yang berperan dalam pelaksanaan kurikulum adalah guru. Guru menjadi kunci utama keberhasilan implementasi kurikulum. Oleh sebab itu, sebegus apapun desain kurikulum yang dirancang namun guru tidak mendukung berlangsungnya kurikulum akan sia-sia. Kurikulum yang sederhana akan menjadi sangat baik jika didukung kemampuan, semangat, dan dedikasi guru yang tinggi.

Faktor penting yang harus ada pada guru sebagai pelaksana kurikulum dan pembelajaran adalah kualifikasi yang dimilikinya. Pengertian kualifikasi tidak hanya pendidikan khusus untuk

memperoleh suatu keahlian atau untuk menduduki jabatan tertentu, tetapi juga kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan tugasnya.

Selain itu terdapat faktor lain penunjang keberhasilan penerapan kurikulum dalam sekolah seperti sarana prasarana, biaya, dan alat bantu atau media pembelajaran yang inovatif.

Sarana dan media pembelajaran sangat menentukan keberhasilan belajar mengajar di kelas. Dalam proses belajar mengajar kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting, karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Kerumitan bahan yang disampaikan kepada anak didik dapat disederhanakan dengan bantuan media. Dengan demikian peserta didik lebih mudah mencerna bahan daripada tanpa bantuan media.

Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua tingkatan yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan tingkat kelas. Dalam tingkat sekolah yang berperan adalah kepala sekolah, dan pada tingkatan kelas yang berperan adalah guru. Walaupun dibedakan antara tugas kepala sekolah dan tugas guru dalam pelaksanaan kurikulum serta diadakan perbedaan dalam tingkat pelaksanaan administrasi, yaitu tingkat kelas dan tingkat sekolah, namun antara kedua tingkat dalam pelaksanaan administrasi kurikulum tersebut senantiasa bergandengan dan bersama-sama bertanggungjawab melaksanakan proses administrasi kurikulum.

c. Evaluasi Kurikulum

Sebagai tahapan terakhir dari kegiatan implementasi kurikulum dituntut adanya ketuntasan aktivitas dan keterukuran hasil yang dicapai. Oleh karena itu pada tahap ini diperlukan adanya kegiatan evaluasi. Menurut Raka Joni bahwa bentuk evaluasi dalam kurikulum terpadu pada dasarnya tidak berbeda dengan bentuk evaluasi kurikulum konvensional, hanya saja evaluasi dalam kurikulum terpadu di samping evaluasi terhadap proses dan hasil harus banyak diarahkan pada evaluasi terhadap dampak pengiring (*nurturane effects*).

Evaluasi pada dasarnya adalah proses penentuan nilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Dalam proses evaluasi terdapat beberapa komponen, yaitu mengumpulkan data atau

informasi yang dibutuhkan sebagai dasar dalam menentukan nilai agar menjadi obyek evaluasi.

Evaluasi kurikulum memegang peranan penting baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya, maupun pada pengambilan keputusan dalam kurikulum. Hasil-hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para pemegang kebijaksanaan pendidikan dan para pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijaksanaan pengembangan sistem pendidikan dan modal pengembangan kurikulum yang digunakan. Hasil evaluasi kurikulum juga dapat dipakai oleh guru, kepala sekolah maupun para pelaksana pendidikan lainnya untuk mengetahui perkembangan siswa, memilih bahan pelajaran, memilih metode serta cara penilaian pendidikan.

Evaluasi menjadi bagian dari kegiatan pengukuran dan penilaian dimana kedua langkah ini dilalui sebelum mengambil keputusan. Pada dasarnya evaluasi merupakan resapan kata dari evaluation yang berarti menilai namun dilakukan dengan mengukur terlebih dahulu.

Evaluasi pendidikan selalu berkaitan dengan prestasi belajar siswa. Definisi ini pertama kali dikembangkan oleh Ralph Tyler, bahwa evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa dan bagian mana tujuan pendidikan tercapai. Secara luas Cronbach dan Stufflebeam mengembangkan pengertian tersebut bahwa proses evaluasi bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan.

Hasil evaluasi menyediakan informasi tentang ukuran prestasi siswa, hasil-hasil ini dapat digunakan untuk membantu guru mengubah program kelas secara individual guru dan sekolah dapat menggunakan evaluasi untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran mereka, kemudian merevisi program mereka ketika kelemahan teridentifikasi.

Nana Sudjana yang dikutip Husnul Yaqin menyebutkan bahwa evaluasi atau penilaian kurikulum penting dilakukan bukan sekedar untuk mengetahui baik tidaknya suatu kurikulum, tetapi juga untuk mengetahui sarana, sumber, dan kemampuan para pelaksana dan pembina kurikulum di sekolah.

SIMPULAN

Implementasi kurikulum terpadu di MI Ibnu Atha'illah: a) perencanaan meliputi penyusunan struktur kurikulum yang berlandaskan pada visi dan misi madrasah, pembagian waktu belajar yang mengadopsi sistem pondok pesantren, dan pembuatan perangkat pembelajaran oleh guru yang diambil dari berbagai literatur. b) Pelaksanaan pembelajaran dikelas guru menggunakan metode yang bervariasi namun sarana dan media pembelajarannya masih kurang lengkap, dan kualifikasi guru yang diutamakan adalah ilmu agama dan Alquran. c) Evaluasi muatan kurikulum dilaksanakan oleh masing-masing guru dikelas, dan evaluasi hasil belajar menggunakan teknik tes tertulis, lisan (hafalan) dan praktik.

REFERENSI

- A.J. Beane, *Curriculum Integration and The Dicipines of Knowledge*, New York: Publication College Board, 1995.
- Arifin, Zainal, *Pengembangan Mutu Kurikulum Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Diva Press, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ary, Donald. *An Invitation to Research in Social Education*, Beverly Hills: Sage Publications, 2002.
- Collin, Gillian. Dizon, *Integrated Learning*, Australia: Bookshelf Publishing, 1991.
- Dakir, *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Fogarty, Robin. *How to Integrate the Curricula*, Illions: IRI/Skylight Publishing. Inc, 1991.
- Hamalik, Oemar, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Idi, Abdullah, *Pengembangan Kurikulum; Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Kurinasih, Imas, *Implementasi Kurikulum 2013 Konsep dan Praktek*, Surabaya: Kata Pena, 2014.
- Nafis, Ahmad H. Syukran. *Manajemen Pendidikan Islam*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2011.
- Olivia, P, *Develoving The Curriculum*, New York: Harper Collins Publisher, 1992.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago: The Uneversity of Chicago Press, 1982.
- Rusman, *Manajemen Kurikulum*, Jakarata: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sabda, Syaifuddin. *Model Kurikulum Terpadu IPTEK dan IMTAQ*, Ciputat: Ciputat Press Group, 2006.
- Sanjaya, Wina. *Kurikulum dan Pembelajaran; Teori dan Praktik Pengembangan KTSP*, Jakarta: Kencana, 2008.